

#### **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Profil Kota Bandar Lampung**

Secara geografis kota Bandar Lampung terletak pada kedudukan  $5^{\circ}20'$  sampai dengan  $5^{\circ}30'$  lintang selatan dan  $105^{\circ}28'$  derajat sampai dengan  $105^{\circ}37'$  derajat bujur timur. Letak tersebut berada di teluk lampung dan diujung selatan pulau sumatera, yang memiliki luas wilayah  $192,18 \text{ Km}^2$  terdiri dari 13 kecamatan dan 98 kelurahan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Padang Cermin dan Ketibung lampung selatan serta Teluk Lampung.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Tanjung Bintang kabupaten Lampung Selatan.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin kabupaten Pesawaran.

Sejak Kemerdekaan Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Kota Tanjungkarang dan Kota Telukbetung berstatus Kota Kecil yang

merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan, wilayah sekitarnya dipisahkan dari wilayah *Onder afdeling* Telokbetong-Tanjungkarang berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 nama Kota Besar Tanjungkarang-Telokbetong dirubah menjadi Kotapraja Tanjungkarang-Telukbetung yang didalamnya terdapat 2 (Dua) Kecamatan: yaitu Kecamatan Tanjungkarang dan Kecamatan Telukbetung, sisa wilayah *Onder afdeling* Telukbetung dimasukkan dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian setelah Keresidenan Lampung dinaikkan statusnya menjadi Provinsi Lampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Kotapraja Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Dati II Tanjungkarang-Telukbetung yang mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 8 Juli 1982, yaitu sejak diserahkan oleh Bupati Kepada Daerah Tingkat II Lampung Selatan kepada Wali kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung diperluas dengan dimasukkannya sebagian Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan yang meliputi 14 Desa Dari sebagian wilayah Kecamatan Kedaton, 14 Desa Kecamatan Panjang. Kemudian berdasarkan Peraturan itu juga kecamatan-

kecamatan dalam Wilayah Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung ditata kembali menjadi 9 Kecamatan dengan 58 Kelurahan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Gubernur/KDH Tingkat I Lampung Nomor G/185.B.III/HK/1988 tanggal 6 Juni 1988 serta Surat Persetujuan MENDAGRI Nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran Kelurahan di Wilayah Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung terdiri dari 9 Kecamatan dengan 84 Kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung menjadi 13 Kecamatan dengan 98 Kelurahan, yaitu:

- a. Kecamatan Kedaton dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Kampung Baru.
- b. Kecamatan Tanjungkarang Timur dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Kota Baru.
- c. Kecamatan Tanjungkarang Barat dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Gedong Air.
- d. Kecamatan Tanjungkarang Pusat dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Palapa.
- e. Kecamatan Sukarame dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Sukarame.
- f. Kecamatan Telukbetung Utara dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Kupang Kota.
- g. Kecamatan Telukbetung Selatan dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Sukaraja.
- h. Kecamatan Telukbetung Barat dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Bakung.
- i. Kecamatan Panjang dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Panjang Selatan.
- j. Kecamatan Kemiling dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Sumberejo.
- k. Kecamatan Rajabasa dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Rajabasa.

l. Kecamatan Tanjung Seneng dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Tanjung Seneng.

m. Kecamatan Sukabumi dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Sukabumi.

Berdasarkan Perda No.12 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung bertambah menjadi 20 kecamatan dengan tidak mengurangi jumlah kecamatan yang sudah ada dan ditambah dengan tujuh kecamatan baru, yaitu:

n. Kecamatan Teluk Betung Timur

o. Kecamatan Bumi Waras

p. Kecamatan Kedamaian

q. Kecamatan Langkapura

r. Kecamatan Way Halim

s. Kecamatan Enggal

t. Kecamatan Labuhan Ratu

## **B. Profil Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Bandar Lampung**

### **1. Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung**

Susunan DPRD Kota Bandar Lampung, terdiri atas anggota partai politik peserta Pemilihan Umum 2009 yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah. DPRD merupakan mitra pemerintah daerah dalam hal menjalankan fungsinya, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Sebagai badan legislasi daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berfungsi membuat peraturan perundang-undangan daerah dalam bentuk

Peraturan Daerah (Perda) dan sebagainya bersama-sama eksekutif dengan senantiasa memperhatikan aspirasi yang berkenaan di masyarakat.

Fungsi lain yang dimiliki lembaga ini adalah sebagai lembaga pengawas jalannya pemerinthan. Hal ini mengandung arti, bahwa ketika lembaga eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan menjalankan fungsinya maka saat itu pula lembaga ini menjalnlkan fungsinya dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Selain dari itu, sebagai perwujudan kepentingan msyarakat Kota Bandar lampung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota bandar Lampung juga melakukan hal yang serupa dengan pemerintah dalam hal melakukan pembinaan yang berkaitan dengan proyek besar pembangunan daerah.

## **2. Keanggotaan, Fraksi-fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung**

### **a. Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung**

Dari hasil Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2009 telah menetapkan keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung sebanyak 45 orang yang masing-masing anggota DPRD Kota Bandar Lampung berasal dari:

1) Partai Demokrat:	10 kursi
2) Partai Golkar:	8 kursi
3) Partai PKS:	5 kursi
4) Partai PAN:	5 kursi
5) Partai PDIP:	5 kursi
6) Partai Gerinda:	4 kursi
7) Partai PPP:	4 kursi
8) Partai Hanura:	2 kursi
9) Partai PKB:	1 kursi
10) Partai PNBK:	1 kursi

**b. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)****Kota Bandar Lampung**

- 1) Pimpinan.
- 2) Badan Musyawarah.
- 3) Komisi.
- 4) Badan Kehormatan.
- 5) Badan Anggaran.
- 6) Badan Legislasi.
- 7) Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

**c. Tugas dan Fungsi Komisi**

Komisi merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD wajib menjadi anggota salah satu komisi, dimana penempatan anggota DPRD dalam komisi-komisi dan perpindahannya ke komisi-komisi didasarkan atas usul fraksi-fraksinya.

Adapun bidang dan tugas komisi DPRD yang tertuang dalam peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 53 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Komisi-komisi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terdiri dari:
  - a) Komisi A : Bidang Pemerintahan dan Hukum
  - b) Komisi B : Bidang Perekonomian dan Keuangan
  - c) Komisi C : Bidang Pembangunan
  - d) Komisi D : Bidang Kesejahteraan Rakyat

- 2) Pembidangan tugas masing-masing meliputi :
- a) Komisi A, bidang pemerintahan, meliputi : Pemerintahan Umum, Ketertiban dan Keamanan, Kependudukan, Komunikasi/Pers, Hukum/Perundang-undangan, Perizinan, Pertanian, Kepegawaian/ Aparatur, Sosial Politik, KPU, Kantor Arsip Daerah dan Organisasi Masyarakat.
  - b) Komisi B, bidang perekonomian dan keuangan, meliputi : Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Pertenakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan Pangan, Logistik, Koperasi, Pariwisata, Dunia Usaha dan Penanaman Modal, Keuangan Daerah, Asset Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Patungan.
  - c) Komisi C, bidang Pembangunan, Meliputi : Pekerjaan Umum, Pemetaan, Penataan dan Pengawasan Kota, Pertamanan, Kebersihan, Perhubungan, Pertambangan, dan Energi, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup.
  - d) Komisi D, bidang kesejahteraan rakyat, meliputi : Ketenagakerjaan, Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kepemudaan dan Olahraga, Agama, Kebudayaan, Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Peranan Wanita, Transmigrasi, Museum dan Cagar Budaya.

**d. Personalia Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung**

Jumlah keanggotaan Komisi C DPRD Kota Bandar Lampung secara keseluruhan berjumlah 11 anggota, yang tersusun atas Ketua Komisi C DPRD Kota Bandar Lampung, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bandar Lampung, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bandar Lampung, dan Anggota Komisi C DPRD Kota Bandar Lampung yang masing-masing berasal dari fraksi Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai PKS, Partai PAN, Partai PDIP, Partai PPP, Partai Gerinda, dan 1 anggota dari Partai Gabungan.

Tabel 2. Data Anggota Komisi C Tahun 2013

No	Jabatan	Jumlah
1.	Ketua	1
2.	Wakil Ketua	1
3.	Sekretaris	1
4.	Anggota	8
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>

Sumber olahan dari data Komisi C Tahun 2013

**C. Profil Bappeda Kota Bandar Lampung**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung, telah mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung dengan Struktur:



1. Kepala Bappeda,
2. Sekretariat, terdiri dari 3 (Tiga) Sub Bagian, yaitu:
  - Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Statistik dan Penelitian terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu:
  - Sub Bidang Statistik dan Pelaporan
  - Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
4. Bidang Ekonomi terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu:
  - Sub Bidang Produksi dan Keuangan
  - Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha
5. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari 2 ( dua ) Sub Bidang yaitu:
  - Sub Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia
  - Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
6. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari 2 ( dua ) Sub Bidang, yaitu :
  - Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
  - Sub Bidang Sarana dan Prasarana
7. Unit Pelaksana Teknis

Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Bappeda Kota Bandar Lampung akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.  
Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **1. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kota Bandar Lampung**

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung diatur berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda sesuai dengan Perda dimaksud, adalah sebagai berikut :

### **1. Tugas Pokok**

Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

### **2. Fungsi**

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan daerah;
- b) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Tugas dan Fungsi Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Bandar Lampung**

Bidang Fisik dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda di bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana meliputi penyusunan rencana serta pengendalian atas pelaksanaan pembangunan fisik dan prasarana.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan Penyusunan perencanaan pembangunan di bidang fisik dan prasarana;
- b. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang fisik dan prasarana;
- c. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antar daerah kabupaten/kota dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang Fisik dan Prasarana;
- d. Bimbingan supervisi dan konsultasi penyusunan rencana pembangunan di bidang Fisik dan Prasarana;
- e. Pengendalian pembangunan di bidang Fisik dan Prasarana.

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

a. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana pembangunan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
2. Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup;
3. Melaksanakan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antar pemerintah kota dengan swasta di bidang penataan ruang, lingkungan hidup, pertambangan, kebersihan dan pertamanan;
4. Mengendalikan pelaksanaan pembangunan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup, pertambangan, kebersihan dan pertamanan;
5. Melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyusunan rencana pembangunan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup, pertambangan, kebersihan dan pertamanan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:

1. Mengoordinasikan dan menyusun rencana pembangunan di bidang pekerjaan umum dan perhubungan;
2. Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pekerjaan umum dan perhubungan;

3. Melaksanakan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antar pemerintah kota dengan swasta di bidang pekerjaan umum dan perhubungan;
4. Mengendalikan pelaksanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum, energi dan perhubungan;
5. Melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyusunan rencana pembangunan di bidang pekerjaan umum dan perhubungan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Tabel 3. Kualitas Anggota Komisi A DPRD Kota Bandar Lampung**

No.	Nama	Usia (tahun)	Pendidikan	Jenis Kelamin	Latar Pekerjaan	Parpol	Suku	Kinerja/Kedisiplinan (%)
1	FERRY FRISAL PARINUSA, SH	49	S1	Pria	Politisi	Demokrat	Lampung	85
2	MUSABAKAH. Amd	38	D3	Pria	Politisi	PPP	Lampung	80
3	ROMI HUSIN. SH	52	S1	Pria	Politisi	Golkar	Lampung	75
4	YUSUF EFFENDI, SE	47	S1	Pria	Pengusaha	PKS	Jawa	75
5	WIYADI. SP	42	S1	Pria	Politisi	PDIP	Jawa	85
6	ARIANTO. SH. MSi	47	S2	Pria	Akademisi	PAN	Jawa	80
7	TAUFIK RAHMAN S.Ag	52	S1	Pria	Akademisi	NKR	Lampung	70
8	ERNITA SH. MH	46	S2	Wanita	Akademisi	Demokrat	Sunda	70
9	IKHWAN FADIL IBRAHIM. SH	44	S1	Pria	Wiraswasta	Gerindra	Lampung	80
10	Hj. DOLLY SANDRA, SP	46	S1	Wanita	Akademisi	Golkar	Lampung	75

**Tabel 4. Kualitas Anggota Komisi B DPRD Kota Bandar Lampung**

No.	Nama	Usia (tahun)	Pendidikan	Jenis Kelamin	Latar Pekerjaan	Parpol	Suku	Kinerja/Kedisiplinan (%)
1	HAMRIN SUGANDI. SE, MH	48	S2	Pria	Politisi	PAN	Jawa	80
2	SEPTRIO FRIZO, SA. SE	37	S1	Pria	Politisi	Demokrat	Lampung	75
3	HENDRI KISINJER, SI. Kom	36	S1	Pria	Pengusaha	PPP	Lampung	80
4	HAMONANGAN NAPITUPULU	51	SMA	Pria	Wiraswasta	PDIP	Batak	80
5	HENDRA MUKRI, S.Sos	35	S1	Pria	Politisi	Demokrat	Jawa	75
6	ENDANG ASNAWI	46	SMA	Pria	Pengusaha	Demokrat	Sunda	80
7	SURYA JAYA AMPERA. SE	38	S1	Pria	Politisi	Golkar	Lampung	80
8	SAININ NURJAYA	41	SMA	Pria	Politisi	Gerindra	Sunda	80
9	Ir. Hj. RATNA HAPSARI B, MM	52	S2	Wanita	Akademisi	NKR	Lampung	85
10	BENNY HN MANSYUR, S.Sos. SH	49	S1	Pria	Politisi	Golkar	Lampung	80

**Tabel 5. Kualitas Anggota Komisi C DPRD Kota Bandar Lampung**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Usia (tahun)</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Latar Pekerjaan</b>	<b>Parpol</b>	<b>Suku</b>	<b>Kinerja/Kedisiplinan (%)</b>
<b>1</b>	H. BARLIAN MANSYUR. Amd	50	D3	Pria	Politisi	Golkar	Lampung	85
<b>2</b>	Ir. RM. AYUB SULAIMAN, SE. MM	52	S2	Pria	Pengusaha	Demokrat	Jawa	75
<b>3</b>	WIDARTO, SE	45	S1	Pria	Politisi	PKS	Jawa	80
<b>4</b>	BENSON WERTHA. SH	41	S1	Pria	Politisi	Golkar	Bugis	85
<b>5</b>	NUR SYAMSI, ST	36	S1	Pria	Wiraswasta	PPP	Lampung	80
<b>6</b>	EFFENDI TASLIM, SE. MM	48	S2	Pria	Akademisi	NKR	Lampung	75
<b>7</b>	HANAFI PULUNG	42	SMA	Pria	Wiraswasta	PDIP	Jawa	80
<b>8</b>	HANDRIE KURNIAWAN. SE	41	S1	Pria	Politisi	PKS	Jawa	80
<b>9</b>	Hi. AGUSMAN ARIEF. SE. MM	48	S2	Pria	Pengusaha	Demokrat	Lampung	85
<b>10</b>	WAHYU LESMONO. SE	37	S1	Pria	Politisi	PAN	Jawa	80
<b>11</b>	Moh. BASIRI AFFANDI. SE	46	S1	Pria	Politisi	Gerindra	Lampung	80

**Tabel 6. Kualitas Anggota Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung**

No.	Nama	Usia (tahun)	Pendidikan	Jenis Kelamin	Latar Pekerjaan	Parpol	Suku	Kinerja/Kedisiplinan (%)
1	NANDANG HENDRAWAN. SE	43	S1	Pria	Politisi	PKS	Jawa	85
2	M. JIMMY KHOEMEINI. SH	45	S1	Pria	Politisi	Gerindra	Lampung	80
3	MW. HERU SAMBODO, ST	37	S1	Pria	Pengusaha	Golkar	Lampung	80
4	Drs. SUWONDO	47	S1	Pria	Pengusaha	Golkar	Jawa	80
5	Dra. Hj. SYARIFAH	48	S1	Wanita	Pengusaha	Demokrat	Lampung	80
6	KOSTIANA, SE	40	S1	Wanita	Politisi	PDIP	Sunda	80
7	YASSER AHMAD. S.Sos	37	S1	Pria	Politisi	NKR	Minangkabau	80
8	MUSWIR. Amd	41	D3	Pria	Politisi	PAN	Lampung	75
9	ZULKISMIR, SE	42	S1	Pria	Pengusaha	Demokrat	Minangkabau	80
10	ALBERT ALAM. S.Pd	47	S1	Pria	Politisi	PPP	Lampung	80

**Tabel 7. Kualitas Pegawai Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah Bappeda Kota Bandar Lampung**

No.	Nama	Usia (tahun)	Pendidikan	Jenis Kelamin	Jabatan	Suku	Kinerja/Kedisiplinan (%)
1	DESTI MEGA PUTRI, SP. MT	45	S2	Wanita	KEPALA BIDANG	Lampung	85
2	FITRIYANTI, ST	30	S1	Wanita	KASUBBID SARANA DAN PRASARANA	Sunda	80
3	CHEPI HENDRI SAPUTRA, ST. MT. MPP	34	S2	Pria	KASUBBID TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Lampung	85
4	ERY ADITYAWAN, ST	31	S1	Pria	STAF	Lampung	75
5	ANTON KURNIAWAN, ST	32	S1	Pria	STAF	Lampung	80
6	HAIRINI, SP	28	S1	Wanita	STAF	Jawa	80
7	FITRIA, ST	31	S1	Wanita	STAF	Palembang	80
8	RATU KEMALASARI, S.Sos	47	S1	Wanita	STAF	Lampung	75
9	RIDWAN	48	SMA	Pria	STAF	Jawa	80



<b>10</b>	SYAFRIN, ST	37	S1	Pria	STAF	Jawa	80
<b>11</b>	DIONA MARTINALOVA, SIP	27	S1	Wanita	STAF	Lampung	75